**EVALUASI KESESUAIAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN CIRCLE INDONESIA DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)**

Oleh:

Ery Kurnianingsih

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: [ery.kurnianingsih@gmail.com](mailto:ery.kurnianingsih@gmail.com)

**ABSTRAK**

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh manajemen kepada pihak eksternal maupun internal. Melihat pentingnya dari segi kegunaan, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku agar dapat diinterpretasikan dengan konsep dan pemahaman yang sama oleh para penggunanya. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hadir dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam penyelenggaraan usahanya seperti koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian unsur laporan keuangan Koperasi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Sipil Indonesia (CIRCLE Indonesia) dengan SAK ETAP. CIRCLE Indonesia merupakan koperasi jasa untuk pengembangan sumber daya masyarakat sipil dengan memberikan layanan manajemen program (perencanaan-*monitoring*-evaluasi), penguatan kapasitas (melalui pelatihan dan *technical assitance/mentoring*) dan riset bagi *Non-Government Organization* (NGO), lembaga donor dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif – komparatif.

Penelitian berdasarkan laporan keuangan untuk tahun buku 2018 adalah telah menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CALK hanya mengungkapkan sebagian informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Hasilnya merekomendasikan agar perusahaan mengungkapkan seluruh informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan pada CALK.

Kata kunci: SAK ETAP, koperasi, laporan keuangan

**PENDAHULUAN**

Kasmir (2008) menuliskan ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yakni neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pencatatan laporan keuangan bagi entitas tanpa akuntan publik dapat dilaksanakan sesuai prosedur Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Praktik akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UKM dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Benjamin (1990) kelemahan UKM dalam penyusunan laporan keuangan itu antara lain disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahamam terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Satyo (2005) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM. Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten.

CIRCLE Indonesia adalah koperasi jasa yang sudah berdiri sejak 2006 yang memberikan pelayanan pada riset, pelatihan karyawan, dan pengembangan organisasi. CIRCLE Indonesia telah menangani berbagai proyek besar di Indonesia. Namun demikian pencatatan keuangan di CIRCLE Indonesia perlu dievaluasi apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP.

**LANDASAN TEORI**

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (IAI, 2016) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah:
   1. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha;
   2. Kreditur;
   3. Lembaga pemeringkat kredit.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. SAK ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP. Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka terdapat beberapa ketentuan transisi dalam SAK ETAP yang cukup ketat. Misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 Januari 2011 Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK ETAP.

Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali.

Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif – komparatif yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan penyajian laporan keuangan CIRLE Indonesia dengan SAK ETAP yang berlaku.

Tempat penelitian ini adalah CIRCLE Indonesia yang berlokasi di Jalan Wijayakusuma No 111 Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta. Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih 1 (satu) bulan yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan akuntansi yang dapat dilihat dari laporan keuangan CIRCLE Indonesia yaitu:

1. Dasar pengukuran aset tetap

Semua aset yang diperoleh perusahaan dicatat dengan nilai sebesar biaya perolehan atau biaya historis.

1. Metode penyusutan aset tetap

Perusahaan menerapkan metode garis lurus sebagai dasar perhitungan penyusutan aset tetap. Masa manfaat didasarkan pada POB Keuangan Bab VII tentang Aset Tetap dan Depresiasi.

1. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya atau menggunakan dasar akrual (*accrual basis*).

Berikut adalah pembahasan laporan keuangan CIRCLE:

1. Neraca

Neraca CIRCLE Indonesia terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. SAK ETAP menyaratkan pos-pos minimal yang perlu ada pada neraca.

Tabel 1 *Checklist* Pos-Pos pada Neraca CIRCLE Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pos Pada Neraca di SAK ETAP | Ada/Tidak di CIRCLE Indonesia |
| 1 | Kas dan setara kas; | Ada |
| 2 | Piutang usaha dan piutang lainnya; | Ada |
| 3 | Persediaan; | Tidak |
| 4 | Properti investasi; | Tidak |
| 5 | Aset tetap; | Ada |
| 6 | Aset tidak berwujud; | Ada |
| 7 | Utang usaha dan utang lainnya; | Ada |
| 8 | Aset dan kewajiban pajak; | Ada |
| 9 | Kewajiban diestimasi; | Ada |
| 10 | Ekuitas | Ada |

Sumber: CIRCLE Indonesia, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa CIRCLE Indonesia telah mencantumkan 8 dari 10 pos-pos minimal yang harus pada neraca yang disyaratkan SAK ETAP.

Tabel 2 Klasifikasi Pos pada Neraca CIRCLE Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Definisi Unsur Pada Neraca menurut SAK ETAP | Pos pada Neraca CIRCLE Indonesia | Keterangan |
| Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. | * Kas * Bank Mandiri 1735 * Bank Mandiri 4237 * Bank Mandiri 4229 * Bank Mandiri 5258 * Piutang Anggota * Piutang Lain-lain * Piutang Pihak Ke-3 * Uang Muka Kegiatan * Pajak Dibayar Dimuka * Sewa Dibayar Dimuka | Aset Lancar |
| * Aset Tetap * Aset Tidak Berwujud | Aset Tidak Lancar |
| Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. | * Hutang Gaji * Hutang BPJS * Hutang Pihak Ke-3 * Hutang PPh Ps 21 * Hutang PPh Badan * Dana-dana Koperasi * Simpanan Sukarela | Kewajiban Jangka Pendek |
| * Tunjangan Akhir Masa Bakti | Kewajiban Jangka Panjang |
| Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. | * Simpanan Pokok * Simpanan Wajib * Donasi * Cadangan Koperasi * SHU Tahun Berjalan |  |

Sumber: CIRCLE Indonesia, 2018

1. Laporan Laba Rugi

Informasi yang disajikan pada laporan laba rugi memiliki syarat minimal pos-pos seperti yang tertera pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 *Checklist* Pos-pos pada Laporan Laba Rugi CIRCLE Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pos pada Laporan Laba Rugi di SAK ETAP | Ada/Tidak di CIRCLE Indonesia |
| 1 | Pendapatan; | Ada |
| 2 | Beban keuangan; | Ada |
| 3 | Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; | Tidak |
| 4 | Beban pajak; | Ada |
| 5 | Laba atau rugi neto | Ada |

Sumber: CIRCLE Indonesia, 2018

Laporan Laba Rugi CIRCLE Indonesia telah mencantumkan 4 dari 5 pos yang disyaratkan oleh SAK ETAP. Perusahaan tidak mencantumkan pos yang berisi bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas.

Perusahaan harus menyajikan Laporan Laba Rugi dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban. Penyajian Laporan Laba Rugi CIRCLE Indonesia telah menggunakan analisis fungsi beban. Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya. Berikut ini adalah klasifikasi biaya pada Laporan Laba Rugi menurut fungsinya:

1. Beban pokok usaha
2. Beban pelatihan regular:
   1. Beban pelatihan *monitoring* dan evaluasi
   2. Beban pelatihan desain dan perencanaan program
   3. Beban pelatihan *most significant change*
   4. Beban pelatihan *theory of change*
3. Beban pengembangan program
4. Beban proyek jangka pendek
5. Beban usaha proyek
6. Beban administrasi dan umum:
7. Beban gaji dan karyawan
8. Beban lembur
9. Bonus pengurus dan staff
10. Tunjangan (honor) pengawas
11. Tunjangan transport pengawas
12. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua
13. Beban PPh Ps 21
14. Beban PPh Ps 23
15. Beban alat tulis kantor
16. Dokumen dan fotokopi
17. Beban transportasi
18. Beban surat dan pos
19. Beban rapat dan konsumsi
20. Beban THR
21. Pajak-pajak
22. Beban lain-lain
23. Beban perkoperasian
24. Beban listrik, air, dan telepon
25. Beban kebersihan dan keamanan
26. Beban rumah tangga
27. Beban sewa
28. Beban perbaikan dan pemeliharaan
29. Beban bensin, parkir, dan tol
30. Beban audit
31. Beban tunjangan akhir masa bakti
32. Beban rapat anggota tahunan (RAT)
33. Beban *workshop* internal
34. Beban sumbangan sosial
35. Beban non-operasional
36. Beban penyusutan peralatan
37. Beban amortisasi harta lainnya
38. Beban amortisasi harta tidak berwujud
39. Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas menunjukkan seperti pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 *Checklist* Pos-pos pada Laporan Perubahan Ekuitas CIRCLE Indonesia

| No | Pos pada Laporan Perubahan Ekuitas di SAK ETAP | Ada/Tidak di CIRCLE Indonesia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laba rugi untuk periode; | Ada |
| 2 | Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas | Ada |
| 3 | Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui | Tidak |
| 4 | Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:   1. Laba atau rugi; 2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dengan ekuitas; 3. Jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah dari modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian. | Ada |

Sumber: CIRCLE Indonesia, 2018

Perusahaan mencantumkan 3 dari 4 pos yang disyaratkan SAK ETAP. Transaksi tersebut diantaranya:

1. Penambahan simpanan wajib
2. Pengurangan simpanan pokok
3. Penambahan dan pengurangan cadangan
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) / dividen
5. Penambahan SHU tahun berjalan
6. Laporan Arus Kas

Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas untuk suatu periode diklasifikasikan menurut aktivitasnya yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan seperti tertera pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 *Checklist* Pos Aktivitas pada Laporan Arus Kas CIRCLE Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pos Aktivitas pada Laporan Arus Kas di SAK ETAP | Ada/Tidak di CIRCLE Indonesia |
| 1 | Aktivitas operasi | Ada |
| 2 | Aktivitas investasi | Ada |
| 3 | Aktivitas pendanaan | Ada |

Sumber: CIRCLE Indonesia, 2018

Laporan Arus Kas CIRCLE Indonesia telah mencantumkan ketiga pos aktivitas sesuai yang disyaratkan oleh SAK ETAP.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Perusahaan melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak:

1. Penyesuaian aset tetap,
2. Penyesuaian aset tidak berwujud,
3. Penurunan piutang usaha,
4. Kenaikan biaya dibayar dimuka,
5. Penurunan kewajiban jangka pendek,
6. Penurunan hutang pajak,
7. Penurunan dana-dana koperasi, dan
8. Kenaikan simpanan sukarela.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas CIRCLE Indonesia yang berasal dari aktivitas investasi adalah pembayaran kas untuk memperoleh aset tidak lancar.

Arus kas CIRCLE Indonesia yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

1. Kenaikan hutang jangka panjang,
2. Pembayaran kas kepada anggota untuk menarik saham entitas,
3. Penerimaan kas dari setoran simpanan wajib, dan
4. Pembayaran SHU.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara normal, urutan penyajikan catatan atas laporan keuangan adalah seperti tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6 *Checklist* Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan CIRCLE Indonesia

| No | Urutan Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan | Ada / Tidak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP | Tidak |
| 2 | Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan | Ada |
| 3 | Informasi yang mendukung pos-pos keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. | Ada |
| 4 | Pengungkapan lain | Ada |

Sumber: CIRCLE Indonesia, 2018

Catatan atas laporan keuangan telah mencantumkan 3 dari 4 unsur normal urutan yang disyaratkan SAK ETAP. Perusahaan tidak mencantumkan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.

Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan (b) kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Informasi kebijakan akuntansi penting CIRCLE Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Laporan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dengan basis akrual kecuali untuk laporan arus kas.
2. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Masa manfaat ditaksir sesuai dengan POB Keuangan Bab VII.
3. SHU yang diperoleh koperasi dialokasikan sebagai cadangan sebesar 80% dan 20% dibagi dengan rincian sbb:
4. Anggota sebesar 50%
5. Pengurus sebesar 10%
6. Pengawas sebesar 5%
7. Direktur 5%
8. Karyawan 5%
9. Dana sosial dan pendidikan sebesar 20%
10. Pendapatan koperasi timbul dari transaksi anggota dan transaksi non anggota menggunakan dasar akrual.
11. Beban diakui saat terjadinya atau dengan menggunakan dasar akrual.

Entitas yang menyatakan kepatuhannya terhadap SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) pada Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan. CIRCLE Indonesia telah memiliki Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) namun demikian belum menuliskan secara lengkap atas seluruh informasi yang mendukung pos-pos keuangan lain. Adapun informasi yang belum di ungkapkan salam CALK adalah sebagai berikut:

1. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas (simpanan sukarela) diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai tanggal jatuh temponya.
2. Ekuitas koperasi terdiri atas modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.
3. Simpanan pokok dan simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
4. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun buku ditujukan untuk pengembangan usaha, menutup risiko kerugian, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi.

SAK ETAP mengatur penyajian dan klasifikasi dalam laporan keuangan. Pos-pos ini harus disajikan dalam pengelompokan yang konsisten. Jika terjadi reklasifikasi, maka hal tersebut harus diungkapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, CIRCLE Indonesia tidak melakukan reklasifikasi pada laporan keuangannya.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Dalam hal ini, laporan keuangan CIRCLE Indonesia telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sejak 2009. Pada tahun buku 2018, KAP memberikan opini atas laporan keuangan CIRCLE Indonesia bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar. Hasil penelitian ini mematahkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2011) yang menyimpulkan penyebab tidak diterapkannya SAK ETAP pada pelaporan keuangan UMKM adalah karena kurangnya pengetahuan akan SAK ETAP oleh pelaku usaha.

Hasil penelitian yang dikemukakan Andriani dan Sinarwati (2014) menyatakan bahwa pencatatan akuntansi UMKM berasis SAK ETAP tidak terlaksana karena faktor internal dan faktor eksternal sedangkan pelaporan keuangan CIRCLE Indonesia sudah lebih baik karena telah menerapkan sebagian SAK ETAP dalam penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Rudiantoro dan Siregar (2011) menyimpulkan penyebab tidak diterapkannya SAK ETAP pada pelaporan keuangan UMKM adalah karena kurangnya pengetahuan akan SAK ETAP oleh pelaku usaha. Hal ini tidak berlaku di CIRCLE Indonesia karena telah mampu menyediakan informasi keuangan yang cukup membantu manajemen dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait pengelolaan perusahaan.

**PENUTUP**

Disimpulkan bahwa CIRCLE Indonesia telah menyusun laporan keuangan lengkap sesuai unsur SAK ETAP. Hal ini berdasarkan SAK ETAP yang menyaratkan laporan lengkap terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun demikian, peneliti menemukan sebagian informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan belum diungkapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

IAI . (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.* Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Indonesia, C. (2018). *Laporan Keuangan CIRCLE Indonesia 2018.* Yogyakarta: CIRCLE Indonesia.